



**PUTUSAN  
Nomor 3920/B/PK/Pjk/2020**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA  
MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara pajak pada peninjauan kembali telah memutuskan dalam perkara:

**DIREKTUR JENDERAL PAJAK**, tempat kedudukan di Jalan Jenderal Gatot Subroto, Nomor 40 – 42, Jakarta;  
Dalam hal ini diwakili oleh kuasa Teguh Budiharto, jabatan Direktur Keberatan dan Banding Direktorat Jenderal Pajak, dan kawan-kawan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor SKU-5378/PJ/2019, tanggal 22 November 2019;

**Pemohon Peninjauan Kembali;**

**Lawan**

**PT FDK INDONESIA**, beralamat di Kawasan Industri MM 2100 Blok MM-1, Jatiwangi, Cikarang Barat, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat, 17520, yang diwakili oleh Prihartanto, jabatan Direktur;

**Termohon Peninjauan Kembali;**

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, ternyata Pemohon Peninjauan Kembali telah mengajukan permohonan peninjauan kembali terhadap Putusan Pengadilan Pajak Nomor PUT-117531.15/2013/PP/M.IB Tahun 2019, tanggal 04 September 2019, yang telah berkekuatan hukum tetap, dalam perkaranya melawan Termohon Peninjauan Kembali dengan *petitum* banding yang pada pokoknya sebagai berikut:

Membatalkan temuan Terbanding atas Koreksi Positif atas Harga Pokok Penjualan sebesar Rp95.720.374.361 (Sembilan Puluh Lima Miliyar Tujuh Ratus Dua Puluh Juta Tiga Ratus Tujuh Puluh Empat Ribu Tiga Ratus Enam Puluh Satu Rupiah) dan mengabulkan seluruhnya banding atas keputusan

Halaman 1 dari 8 halaman. Putusan Nomor 3920/B/PK/Pjk/2020



keberatan Nomor KEP-01292/KEB/WPJ.07/2017 tanggal 20 Juli 2017 serta menetapkan pajak terutang yang seharusnya berdasarkan perhitungan sebagai berikut:

Penghasilan Netto	Rp.	(21.615.423.631)
Penghasilan kena pajak	Rp.	(21.615.423.631)
PPh Terutang	Rp.	0
Pengembalian PPh Pasal 24		
Yang telah diperhitungkan tahun lalu	Rp.	0
Jumlah PPh Terutang	Rp.	0
Kredit Pajak	Rp.	114.429.000
Pajak yang tidak/kurang bayar	Rp.	(114.429.000)
Sanksi Administrasi	Rp.	0
Jumlah PPh ymh (lebih) dibayar	Rp.	(114.429.000)

Menimbang, bahwa atas banding tersebut, Terbanding mengajukan surat uraian banding tanggal 23 Januari 2018;

Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak Nomor PUT-117531.15/2013/PP/M.IB Tahun 2019, tanggal 04 September 2019, yang telah berkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:

Mengabulkan seluruhnya banding Pemohon Banding terhadap Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor: **KEP-01292/KEB/WPJ.07/2017 tanggal 20 Juli 2017**, tentang keberatan Wajib Pajak atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB) Pajak Penghasilan Tahun Pajak 2013 Nomor: 00005/206/13/055/16 tanggal 29 April 2016, atas nama: **PT FDK Indonesia**, NPWP 01.061.883.3-055.000, beralamat di Kawasan Industri MM 2100 Blok MM-1, Jatiwangi, Cikarang Barat, Kab. Bekasi, Jawa Barat, 17520, sehingga perhitungan pajak menjadi sebagai berikut:

No	Uraian	Jumlah (Rp)
1	Penghasilan Neto /(Rugi)	(21.615.423.631,00)
2	Kompensasi Kerugian	0,00
3	Penghasilan Kena Pajak	(21.615.423.631,00)
4	Pajak Penghasilan terutang	0,00
5	Kredit Pajak	114.429.000,00
6	Pajak Kurang/(Lebih) Bayar	(114.429.000,00)
7	Sanksi Administrasi UU KUP	0,00
8	Jumlah PPh Yang Masih Harus/(Lebih) Dibayar	(114.429.000,00)



Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Pemohon Peninjauan Kembali pada tanggal 12 September 2019, kemudian terhadapnya oleh Pemohon Peninjauan Kembali diajukan permohonan peninjauan kembali secara tertulis di Kepaniteraan Pengadilan Pajak pada tanggal 6 Desember 2019 dengan disertai alasan-alasannya yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Pajak tersebut pada tanggal 6 Desember 2019;

Menimbang, bahwa permohonan peninjauan kembali *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan oleh Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, *juncto* Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak, maka permohonan peninjauan kembali tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan Memori Peninjauan Kembali yang diterima tanggal 6 Desember 2019 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Putusan ini, Pemohon Peninjauan Kembali memohon kepada Mahkamah Agung untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan permohonan peninjauan kembali atas Putusan Pengadilan Pajak Nomor PUT-117531.15/2013/PP/M.IB Tahun 2019 tanggal 4 September 2019 yang dimohonkan Pemohon Peninjauan Kembali;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Pajak Nomor PUT-117531.15/2013/PP/M.IB Tahun 2019 tanggal 4 September 2019, karena Putusan Pengadilan tersebut telah dibuat bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku;
3. Dengan mengadili sendiri:
  3. 1. Menolak permohonan banding Termohon Peninjauan Kembali;
  3. 2. Menyatakan bahwa Surat Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor: KEP-01292/KEB/WPJ.07/2017 tanggal 20 Juli 2017, tentang keberatan Wajib Pajak atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(SKPKB) Pajak Penghasilan Tahun Pajak 2013 Nomor: 00005/206/13/055/16 tanggal 29 April 2016, atas nama: PT FDK Indonesia, NPWP 01.061.883.3-055.000, beralamat di Kawasan Industri MM 2100 Blok MM-1, Jatiwangi, Cikarang Barat, Kab. Bekasi, Jawa Barat, 17520, adalah telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku sehingga oleh karenanya telah sah dan berkekuatan hukum;

3. 3. Menyatakan bahwa Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB) Pajak Penghasilan Tahun Pajak 2013 Nomor: 00005/206/13/055/16 tanggal 29 April 2016, atas nama: PT FDK Indonesia, NPWP 01.061.883.3-055.000, beralamat di Kawasan Industri MM 2100 Blok MM-1, Jatiwangi, Cikarang Barat, Kab. Bekasi, Jawa Barat, 17520 adalah telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku sehingga oleh karenanya telah sah dan berkekuatan hukum;
3. 4. Menghukum Termohon Peninjauan Kembali untuk membayar semua biaya dalam perkara *a quo*;

Atau:

Apabila Majelis Hakim Mahkamah Agung yang memeriksa dan mengadili permohonan peninjauan kembali ini berpendapat lain, maka mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap Memori Peninjauan Kembali tersebut, Termohon Peninjauan Kembali telah mengajukan Kontra Memori Peninjauan Kembali pada tanggal 15 Januari 2020 yang pada intinya putusan Pengadilan Pajak sudah tepat dan benar serta menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan peninjauan kembali tersebut, Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan-alasan permohonan Pemohon Peninjauan Kembali tidak dapat dibenarkan, karena putusan Pengadilan Pajak yang menyatakan mengabulkan seluruhnya banding Pemohon Banding terhadap Keputusan Terbanding Nomor: KEP-01292/KEB/WPJ.07/2017 tanggal 20 Juli 2017

Halaman 4 dari 8 halaman. Putusan Nomor 3920/B/PK/Pjk/2020



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengenai keberatan atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB) Pajak Penghasilan Tahun Pajak 2013 Nomor: 00005/206/13/055/16 tanggal 29 April 2016 atas nama Pemohon Banding, NPWP: 01.061.883.3-055.000; sehingga pajak yang masih harus dibayar menjadi lebih bayar sebesar Rp114.429.000,00; adalah sudah tepat dan benar dengan pertimbangan:

- a. bahwa alasan-alasan permohonan Pemohon Peninjauan Kembali dalam perkara *a quo* yaitu Koreksi Saldo Persediaan Awal sebesar Rp83.224.795.878,00; dan Koreksi atas variance persediaan akhir Rp12.495.578.483,00; yang tidak dapat dipertahankan oleh Majelis Hakim Pengadilan Pajak tidak dapat dibenarkan, karena setelah meneliti dan menguji kembali dalil-dalil yang diajukan dalam Memori Peninjauan Kembali oleh Pemohon Peninjauan Kembali dihubungkan dengan Kontra Memori Peninjauan Kembali tidak dapat menggugurkan fakta-fakta dan melemahkan bukti-bukti yang terungkap dalam persidangan serta pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Pajak, karena dalam perkara *a quo* berupa substansi yang telah diperiksa, diputus dan diadili oleh Majelis Hakim Pengadilan Pajak dengan benar, sehingga Majelis Hakim Agung mengambil alih pertimbangan hukum dan menguatkan putusan Pengadilan Pajak *a quo* karena *in casu* yang terkait dengan nilai pembuktian yang lebih mengedepankan asas kebenaran materiil dan melandaskan prinsip *substance over the form* yang telah memenuhi asas *Ne Bis Vexari Rule* sebagaimana yang telah mensyaratkan bahwa semua tindakan administrasi harus berdasarkan peraturan perundang-undangan dan hukum. Bahwa karenanya yang menjadi objek sengketa berupa Koreksi Saldo Persediaan Awal sebesar Rp83.224.795.878,00; dan Koreksi atas variance persediaan akhir Rp12.495.578.483,00; yang telah dipertimbangkan berdasarkan fakta, bukti-bukti dan penerapan hukum serta diputus dengan kesimpulan tidak dipertahankan oleh Majelis Hakim sudah tepat dan benar. Dengan demikian Majelis Hakim Agung berkeyakinan dan berketetapan untuk menguatkan kembali putusan *a quo* karena penerbitan keputusan Terbanding sekarang Pemohon Peninjauan Kembali tidak dilakukan berdasarkan kewenangan,

Halaman 5 dari 8 halaman. Putusan Nomor 3920/B/PK/Pjk/2020



prosedur dan substansi hukum yang secara terukur (*Rechtmatigheid van bestuur dan Presumption iustae causa*) dalam rangka penyelenggaraan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik (AAUPB) khususnya asas kepastian hukum dan asas kecermatan karena *in casu* berupa substansi didukung dengan kebenaran materiil atas Laporan Keuangan tahun 2012 dan 2013 audited di antaranya bahwa Saldo Awal sebesar Rp581.051.321.510,00 dan Saldo Akhir sebesar Rp569.743.813.747,00 yang disajikan pada lampiran II SPT PPh Badan tahun 2013, merupakan hasil penjumlahan dari saldo Akun 50001 s.d. 50207 yang merupakan akun untuk mencatat biaya produksi, sehingga bukan merupakan saldo persediaan/Inventory sebagai Asset yang disajikan dalam Neraca. Sedangkan atas Saldo Inventory per 31 Maret 2013 sebesar US\$4,643,181.00 setara dengan Rp41.863.301.987,00 dan saldo per 31 Maret 2014 adalah sebesar US\$6,607,195,00 setara dengan Rp74.974.703.838,00 yang telah dipertimbangkan dan diputus oleh Majelis Hakim Pengadilan Pajak dan berikut selebihnya sudah benar dan olehkarenanya koreksi Terbanding (sekarang Pemohon Peninjauan Kembali) dalam perkara *a quo* tidak dapat dipertahankan karena tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagaimana diatur dalam Pasal 3 ayat (1) dan Penjelasan serta Pasal 4 ayat (1), Pasal 28 ayat (11), Pasal 29 berikut dengan Penjelasan Pasal 29 ayat (2) Alinea Ketiga Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan *juncto* Pasal 4 ayat (1), Pasal 6 ayat (1) dan Pasal 9 ayat (1) Undang-Undang Pajak Penghasilan *juncto* Pasal 69 ayat (1) huruf e dan Pasal 78 Undang-Undang Pengadilan Pajak *juncto* PSAK Nomor 14;

- b. bahwa dengan demikian, alasan-alasan permohonan Pemohon Peninjauan Kembali tidak dapat dibenarkan karena bersifat pendapat yang tidak bersifat menentukan karena tidak terdapat putusan Pengadilan Pajak yang nyata-nyata bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagaimana diatur dalam Pasal 91 huruf e Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak, sehingga pajak yang masih harus dibayar dihitung kembali



menjadi lebih bayar sebesar Rp114.429.000,00; dengan perincian sebagai berikut:

Penghasilan Neto /(Rugi)	Rp	(21.615.423.631,00)
Kompensasi Kerugian	Rp	0,00
Penghasilan Kena Pajak	Rp	(21.615.423.631,00)
Pajak Penghasilan terutang	Rp	0,00
Kredit Pajak	Rp	114.429.000,00
Pajak Kurang/(Lebih) Bayar	Rp	(114.429.000,00)
Sanksi Administrasi UU KUP	Rp	0,00
Jumlah PPh Yang Masih Harus/(Lebih) Dibayar	Rp	(114.429.000,00)

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka permohonan peninjauan kembali yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali tersebut adalah tidak beralasan sehingga harus ditolak;

Menimbang, bahwa karena permohonan peninjauan kembali ditolak, maka biaya perkara dalam peninjauan kembali ini harus dibebankan kepada Pemohon Peninjauan Kembali;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak, serta peraturan perundang-undangan yang terkait;

#### MENGADILI:

1. Menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali: **DIREKTUR JENDERAL PAJAK**;
2. Menghukum Pemohon Peninjauan Kembali membayar biaya perkara pada peninjauan kembali sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Kamis, tanggal 5 November 2020, oleh Prof. Dr. H. Supandi, S.H., M.Hum. Ketua Muda Mahkamah Agung Urusan Lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, bersama-sama dengan Prof. Dr. H.M. Hary Djatmiko, S.H., M.S. dan Dr. H. Yodi Martono Wahyunadi, S.H., M.H. Hakim-Hakim Agung sebagai



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan Michael Renaldy Zein, S.H., M.H. Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh para pihak.

Anggota Majelis:

Ketua Majelis,

ttd.

ttd.

Prof. Dr. H. M. Hary Djatmiko, S.H., M.S.

Prof. Dr. H. Supandi, S.H., M.Hum.

ttd.

Dr. H. Yodi Martono Wahyunadi, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd.

Michael Renaldy Zein, S.H., M.H.

Biaya-biaya:

1. Meterai	Rp	6.000,00
2. Redaksi	Rp	10.000,00
3. Administrasi PK	Rp	2.484.000,00
Jumlah	Rp	2.500.000,00

Untuk salinan  
Mahkamah Agung RI  
atas nama Panitera  
Panitera Muda Tata Usaha Negara,

H. Ashadi, S.H.

NIP 19540924 198403 1 001

Halaman 8 dari 8 halaman. Putusan Nomor 3920/B/PK/Pjk/2020